

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Indeks Perkembangan Harga/IPH (Non-IHK)

Sumber: Bagian Perekonomian, 2025

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Garut hingga Triwulan 3 tahun 2025, terlihat bahwa terdapat lima bulan periode peningkatan IPH dan empat bulan periode penurunan IPH, yang secara total maka dapat terlihat peningkatan IPH sebesar 2,02% dari awal tahun hingga bulan September tahun 2025. Kenaikan IPH di lima bulan tersebut umumnya dipicu oleh:

- Peningkatan permintaan musiman, hari besar keagamaan, dan libur awal tahun, di mana konsumsi rumah tangga meningkat.
- Cuaca ekstrem dan gangguan produksi: Maret dan September sering kali terdampak transisi musim, mempengaruhi hasil panen seperti cabai dan sayuran.
- Distribusi dan pasokan terbatas: Juni dan Juli, meski bukan musim panen utama, tetap menunjukkan kenaikan karena pasokan terbatas dan distribusi belum optimal.
- Komoditas yang sering menjadi andil utama peningkatan IPH adalah cabai rawit dan cabai merah.

Sedangkan penurunan IPH di empat bulan disebabkan oleh:

- Panen raya dan surplus pasokan: April dan Mei adalah masa panen beberapa komoditas seperti beras dan sayuran, menyebabkan harga turun.
- Stabilisasi pasca lonjakan: Februari dan Agustus cenderung mengalami koreksi setelah lonjakan harga di bulan sebelumnya.
- Komoditas yang sering menjadi andil utama penurunan IPH adalah cabai rawit dan daging ayam ras.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa cabai rawit menjadi komoditas yang tidak hanya memiliki andil pada peningkatan juga penurunan IPH di Kabupaten Garut. Meskipun Kabupaten Garut menjadi sentra cabai, dimana Kabupaten Garut memiliki Champion Cabai atas intervensi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, skema pertanian cabai yang diterapkan adalah *contract farming*, dimana hasil panen cabai tidak dijual dan diedarkan di dalam daerah namun langsung dikirim untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta dan sekitarnya. Akibatnya cabai yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Garut adalah cabai yang sebelumnya telah dijual di luar daerah yang kemudian disalurkan kembali ke dalam daerah, sehingga harganya ikut bergejolak dengan yang terjadi di pasar nasional.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Selama Triwulan III Tahun 2025 (Juli-September), pengendalian inflasi di Kabupaten Garut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, musiman, dan kelembagaan. Meskipun tekanan inflasi relatif lebih terkendali dibandingkan Triwulan II yang dipengaruhi

oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, dinamika harga komoditas pangan strategis tetap menunjukkan volatilitas yang perlu diantisipasi secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Permasalahan pengendalian inflasi pada periode ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan pasokan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi infrastruktur distribusi, kapasitas fiskal daerah, efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keterbatasan kelembagaan daerah dalam pengelolaan pangan, mengingat Kabupaten Garut belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus di bidang pangan.

1. Volatilitas Harga Komoditas Pangan Strategis Akibat Faktor Produksi dan Cuaca

Pada Triwulan III Tahun 2025, fluktuasi harga pangan di Kabupaten Garut masih didominasi oleh komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta komoditas protein hewani. Faktor utama penyebab volatilitas harga pada periode ini adalah gangguan produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu, termasuk curah hujan di luar pola musim yang memengaruhi siklus tanam dan panen petani.

Selain itu, kenaikan biaya produksi pertanian, seperti harga pupuk non-subsidi, biaya tenaga kerja, serta ongkos distribusi dari sentra produksi ke pasar konsumen, turut memberikan tekanan terhadap harga jual komoditas pangan di tingkat pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun permintaan masyarakat relatif stabil pasca-HBKN, sisi penawaran masih rentan terhadap gangguan eksternal.

2. Keterbatasan Alokasi Anggaran Daerah

Pengendalian inflasi yang memerlukan intervensi cepat, seperti operasi pasar murah atau subsidi harga, membutuhkan ketersediaan dana yang cukup. Meskipun Kabupaten Garut telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kegiatan TPID, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah secara merata. Beberapa program hanya dapat dilaksanakan secara reaktif, terutama dalam merespons lonjakan harga musiman, tanpa perencanaan jangka menengah yang konsisten.

3. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi dan Logistik Pangan

Permasalahan infrastruktur distribusi masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Garut. Kondisi jaringan jalan di beberapa wilayah sentra produksi pertanian, khususnya di daerah perdesaan dan wilayah selatan Garut, belum sepenuhnya mendukung kelancaran distribusi barang. Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi dan potensi keterlambatan pasokan ke pasar.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, dan fasilitas pascapanen menyebabkan hasil pertanian tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang optimal. Akibatnya, pasokan pangan menjadi sangat bergantung pada siklus panen harian dan kondisi cuaca, yang pada akhirnya meningkatkan volatilitas harga di tingkat konsumen.

4. Belum Terbentuknya BUMD Pangan sebagai Instrumen Stabilisasi Harga

Tidak adanya BUMD pangan di Kabupaten Garut menjadi salah satu keterbatasan struktural

dalam pengendalian inflasi daerah. Berbeda dengan daerah yang memiliki BUMD pangan sebagai buffer stock dan stabilisator harga, Pemerintah Kabupaten Garut masih sangat bergantung pada mekanisme pasar, intervensi terbatas melalui operasi pasar, serta koordinasi dengan instansi vertikal seperti Bulog.

Kondisi ini menyebabkan ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan intervensi harga secara langsung menjadi terbatas, baik dari sisi pengadaan, penyimpanan, maupun distribusi pangan strategis. Oleh karena itu, peran TPID menjadi sangat krusial dalam mengoptimalkan instrumen kebijakan yang tersedia, meskipun tanpa dukungan kelembagaan BUMD pangan.

5. Sinergi Antar Pemangku Kepentingan yang Belum Optimal

Meskipun koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID telah dilaksanakan secara rutin, sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, dan kelompok tani, masih perlu diperkuat. Pada Triwulan III, koordinasi lintas sektor cenderung bersifat responsif terhadap gejolak harga, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perencanaan yang bersifat preventif dan berbasis data jangka menengah.

Keterbatasan integrasi data harga, data pasokan, dan informasi distribusi antar instansi menyebabkan pengambilan kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi yang real time dan komprehensif.

5. Fluktuasi Harga Komoditas Strategis

Beberapa komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga signifikan selama Triwulan III 2025. Berdasarkan pantauan harga dari pasar-pasar utama di Garut dan sumber nasional, komoditas yang mengalami lonjakan harga antara lain:

Komoditas	Harga Tertinggi (Rp/kg)	Periode	Penyebab Utama
Cabai rawit merah/inul	Rp63.500	Juli 2025	Pasokan cabai berkurang, cuaca mempengaruhi kerusakan pada tanaman
Bawang merah	Rp42.000-44.000	Juli-Agustus 2025	Permintaan lebaran, pasokan menurun
Daging ayam broiler	Rp36.000-37.000	September 2025	Kenaikan harga pakan ayam, tingginya permintaan, peremajaan induk
Telur ayam ras	Rp28.000-29.000	Juli-September 2025	Kenaikan harga pakan ayam, tingginya permintaan, menurunnya produksi
Cabai merah keriting	Rp51.000	Juli 2025	Pasokan cabai berkurang, cuaca mempengaruhi kerusakan pada tanaman
Cabai merah besar	Rp63.000-70.700	Juli-September 2025	Pasokan cabai berkurang, cuaca mempengaruhi kerusakan pada tanaman

Fluktuasi harga tersebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah menjadi salah satu faktor utama penyumbang inflasi daerah pada periode ini.

6. Masih Terbatasnya Skala Produksi Pangan Mandiri Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Garut telah mendorong berbagai program ketahanan pangan lokal seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Gerakan Tanam Panen Cepat (Harum Madu). Namun, cakupan pelaksanaan program ini masih terbatas pada sebagian kecamatan dan belum menjangkau secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat. Padahal, inisiatif ini berpotensi besar dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di tingkat lokal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, pengendalian inflasi di Kabupaten Garut pada Triwulan III Tahun 2025 masih menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari volatilitas harga komoditas strategis, keterbatasan infrastruktur distribusi, ketiadaan BUMD pangan, hingga belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Meskipun tekanan inflasi relatif lebih terkendali dibandingkan Triwulan II, potensi risiko inflasi tetap perlu diantisipasi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengendalian inflasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan koordinasi TPID, peningkatan kualitas infrastruktur distribusi dan logistik pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD), serta pemanfaatan sistem monitoring harga berbasis digital sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Garut pada Triwulan III Tahun 2025 difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan pasokan, serta memperkuat kelancaran distribusi antar wilayah. Kebijakan ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Garut.

TPID Kabupaten Garut berperan sebagai forum strategis dalam menghimpun data harga dan pasokan, merumuskan langkah antisipatif terhadap potensi gejolak inflasi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian harga di pasar rakyat. Tanpa dukungan BUMD pangan, TPID mengoptimalkan peran perangkat daerah teknis, kerja sama dengan Bulog, serta sinergi dengan pelaku usaha dan distributor.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu stabil sesuai dengan *range* yang telah ditetapkan serta untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, menjaga daya beli Masyarakat dan mengurangi disparitas harga antar kecamatan/wilayah, TPID Kabupaten Garut telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga

2. Monitoring Ketersediaan Ternak Hidup Di Pasar Hewan;

Ketersediaan ternak hidup di pasar hewan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan komoditas pangan asal hewan di daerah. Monitoring ketersediaan ternak hidup, khususnya sapi, kambing, dan domba, dilakukan untuk memastikan pasokan yang cukup guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada periode permintaan tinggi. Ketersediaan ternak hidup yang memadai di pasar hewan berkontribusi langsung terhadap stabilitas harga di tingkat konsumen. Pasokan yang terjaga membantu mencegah lonjakan harga akibat kelangkaan, sekaligus memberi ruang terbentuknya harga yang wajar melalui mekanisme pasar. Kondisi ini sangat penting dalam mendukung strategi keterjangkauan harga sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah.

Dalam kerangka pengendalian inflasi, pasar hewan berperan sebagai titik temu antara peternak dan pelaku usaha, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien. Dengan distribusi ternak yang lancar dan pasokan yang stabil, tekanan inflasi pada komoditas daging dapat ditekan, khususnya pada kelompok makanan yang memiliki andil besar terhadap inflasi daerah. Dengan demikian, terjaganya ketersediaan ternak hidup di pasar hewan tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha peternakan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keterjangkauan harga pangan hewani dan memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan. Laporan ketersediaan ternak di Pasar Hewan adalah sebagai berikut :

Nama Pasar	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Ternak (Ekor Per Hari Pasar)	Keterangan
Pasar Bayongbong	300	Hari Pasar : Senin dan Kamis Jenis Ternak : Domba dan Kambing
Pasar Wanaraja	150	Hari Pasar : Rabu dan Minggu Jenis Ternak : Domba dan Kambing
Pasar Bungbulang	500	Hari Pasar : Selasa Jenis Ternak : Domba
Pasar Limbangan	200	Hari Pasar : Selasa Jenis Ternak : Domba

1. Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Pengadaan bibit ternak yang bersumber dari daerah kabupaten/kota lain merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan populasi dan produksi ternak di daerah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap keterbatasan bibit lokal, sekaligus untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan produksi ternak masyarakat. Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, pengadaan bibit ternak dari luar daerah berperan penting dalam

menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan hewani secara berkelanjutan. Ketersediaan bibit yang cukup memungkinkan peternak untuk meningkatkan populasi ternak secara bertahap, sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan produksi daging, telur, maupun produk peternakan lainnya.

Kondisi tersebut mendukung strategi keterjangkauan harga, karena pasokan yang terjaga dapat menekan potensi kenaikan harga akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dengan terjaminnya ketersediaan bibit ternak, risiko fluktuasi harga di tingkat masyarakat dapat diminimalkan, khususnya pada komoditas pangan hewani yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi daerah. Adapun realisasi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Domba Ras Garut Fase Muda sebanyak 36 ekor untuk ternak jantan dan 247 ekor untuk ternak betina
- Pengadaan Sapi Potong Ras Pasundan Fase Anak sebanyak 6 ekor
- Pengadaan Ayam Buras Jantan sebanyak 200 ekor dan Betina sebanyak 600 ekor
- Pengadaan Sapi Perah Betina Ras Friesian Holstein Fase Dewasa sebanyak 22 ekor
- Pengadaan Kambing Lokal Fase Muda Jantan sebanyak 1 ekor dan Betina sebanyak 7 ekor
- Pengadaan Ayam Ras Petelur sebanyak 5.323 ekor
- Pengadaan Itik Petelur sebanyak 420 ekor
- Pengadaan Kerbau Jantan sebanyak 1 ekor dan Betina sebanyak 6 ekor
- Pengadaan Sapi Potong Betina Ras Silangan/Cross Breed/Pegon Fase Muda sebanyak 6 ekor
- Pengadaan Ayam Petelur sebanyak 2.730 ekor

1. Ketersediaan Pasokan

Pemkab Garut menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, seperti Kabupaten Ciamis untuk menjaga pasokan barang, khususnya daging ayam, telur, dan cabai. Selain itu, program seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Gerakan Tanam Panen Cepat (Harum Madu) turut digalakkan guna memperkuat produksi pangan lokal.

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Dilaksanakan secara selektif di wilayah yang mengalami tekanan harga tinggi, bekerja sama dengan Bulog dan distributor pangan.
2. Melakukan monitoring HARUM MADU dan GITARASA
3. Optimalisasi penanaman cabai pada kegiatan HARUM MADU baik di demplot atau pekarangan rumah masyarakat melalui polibag.
4. Optimalisasi penanaman bawang merah, aneka cabai, telur ayam pada kegiatan GITA RASA.
5. Monitoring Produksi Telur Pada Program MEDALI EMAS (Mengendalikan Inflasi Melalui Peternakan Masyarakat)

Monitoring produksi telur pada Program MEDALI EMAS (Mengendalikan Inflasi Melalui Peternakan Masyarakat) merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan produksi telur dari peternak rakyat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan monitoring ini mencakup pemantauan jumlah peternak binaan, populasi ayam petelur, tingkat produksi telur harian, serta kendala yang dihadapi peternak di tingkat lapangan.

Melalui penguatan produksi telur di tingkat masyarakat, Program MEDALI EMAS berperan penting dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sumber protein hewani yang terjangkau.

Produksi telur yang stabil dari peternakan masyarakat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga secara langsung, sehingga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dan menekan potensi kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan.

Dalam kerangka pengendalian inflasi daerah, monitoring produksi telur ini mendukung strategi ketersediaan pasokan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan pasokan yang cukup dan distribusi yang lebih pendek dari produsen ke konsumen, harga telur di tingkat masyarakat dapat dijaga tetap stabil dan terjangkau.

Kondisi saat ini produksi telur pada Program MEDALI EMAS yang berlokasi di Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja sebesar 82% dengan populasi sebanyak 392 ekor dari populasi awal sebanyak 400 ekor.

1. Revitalisasi dan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)

Revitalisasi dan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan hewani sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. RPH yang berfungsi dengan baik menjadi infrastruktur penting untuk menjamin kelancaran pemotongan ternak, keamanan pangan, serta kesinambungan distribusi daging kepada masyarakat. Melalui revitalisasi dan pembangunan RPH yang memenuhi standar teknis dan higienis, proses pemotongan ternak dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada terjaganya pasokan daging di pasar, terutama pada periode permintaan tinggi. Ketersediaan pasokan yang stabil menjadi kunci dalam mencegah kelangkaan dan lonjakan harga daging yang dapat memicu tekanan inflasi.

Dalam kerangka strategi ketersediaan pasokan, keberadaan RPH yang memadai juga memperpendek rantai distribusi dan mengurangi biaya logistik. Efisiensi tersebut berkontribusi pada pembentukan harga daging yang lebih wajar dan stabil di tingkat konsumen, sehingga mendukung pengendalian inflasi pada kelompok makanan.

1. Kelancaran Distribusi

Perbaikan jalur distribusi barang dan logistik menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi. Keterlibatan pelaku transportasi lokal difasilitasi untuk mendukung kelancaran suplai komoditas ke pasar-pasar tradisional.

1. Pengaturan Lalu Lintas oleh UPTD Wilayah I

Pengaturan lalu lintas oleh UPTD Dinas Perhubungan Wilayah I dilaksanakan pada saat pelaksanaan monitoring oleh TPID Kab. Garut ke distributor minyak agar pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar. Monitoring dilaksanakan terkait pengendalian Harga Bahan Pokok oleh Pimpinan Daerah sebagai tindak lanjut *Zoom Meeting* Rakor TPID.

1. Komunikasi yang Efektif

Pemerintah daerah mengoptimalkan diseminasi informasi harga dan ketersediaan stok melalui media sosial, situs resmi pemerintah, dan papan informasi di pasar. Kampanye edukatif tentang belanja bijak, pemanfaatan pekarangan, dan kewaspadaan terhadap hoaks harga juga dilakukan untuk membangun literasi masyarakat.

1. Rapat koordinasi Dwimingguan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Pemantauan harga komoditas pangan strategis pada aplikasi SIMPANGAN secara *real time*;
3. Rapat Teknis dan High Level Meeting (HLM) TPID

Sebagai forum evaluasi dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi berbasis data dan kondisi lapangan terkini.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah merupakan proses strategis untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program yang telah dijalankan mampu menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai dasar perbaikan kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi, iklim, dan distribusi komoditas di tingkat lokal.

Di Kabupaten Garut, evaluasi kebijakan pengendalian inflasi dilakukan secara berkala oleh **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** melalui mekanisme pemantauan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), harga harian komoditas strategis di pasar rakyat, kondisi distribusi logistik, serta hasil pelaksanaan program intervensi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Evaluasi juga didukung oleh koordinasi intensif dengan **Bank Indonesia**, aparat pengawasan, serta hasil monitoring lapangan.

Memasuki **Triwulan III Tahun 2025**, dinamika pengendalian inflasi di Kabupaten Garut menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan Triwulan II. Tekanan inflasi tidak lagi didominasi oleh faktor hari besar keagamaan, melainkan dipengaruhi oleh **peralihan musim kemarau, gangguan produksi pangan hortikultura**, serta **peningkatan biaya distribusi dan logistik**.

1. **Capaian Positif**
2. Stabilisasi Harga Beberapa Komoditas Strategis

Pada Triwulan III Tahun 2025, TPID Kabupaten Garut berhasil menjaga stabilitas harga beberapa komoditas pangan pokok utama seperti **beras medium, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras**. Upaya ini didukung oleh:

- pelaksanaan operasi pasar secara selektif,
- fasilitasi distribusi antar wilayah,
- serta koordinasi dengan daerah pemasok melalui **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)**.

Stabilisasi harga ini berkontribusi positif dalam menahan laju inflasi daerah agar tetap berada

dalam kisaran yang terkendali.

2. Penguatan Koordinasi dan Konsistensi TPID

Koordinasi TPID pada Triwulan III semakin terstruktur melalui:

- *High Level Meeting* (HLM) rutin;
- rapat teknis lintas OPD; dan
- peningkatan peran sekretariat TPID dalam pengolahan data harga.

Sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, serta dukungan Bank Indonesia memberikan arah kebijakan yang lebih terpadu meskipun Kabupaten Garut belum memiliki BUMD pangan sebagai instrumen stabilisasi stok.

3. Peningkatan Peran Komunikasi Publik

Upaya komunikasi publik terkait kondisi harga, ketersediaan pangan, dan imbauan belanja bijak terus diperkuat melalui media sosial pemerintah daerah, kegiatan penyuluhan, serta keterlibatan aparat kecamatan dan desa. Hal ini berkontribusi dalam meredam kepanikan pasar dan ekspektasi inflasi di tingkat masyarakat.

1. Permasalahan dan Tantangan

1. Volatilitas Harga Komoditas Hortikultura

Pada Triwulan III 2025, komoditas **cabai merah**, **cabai rawit**, dan **bawang merah** kembali mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi. Faktor utama penyebabnya antara lain:

- penurunan produksi akibat kemarau panjang,
- keterbatasan pasokan lokal,
- serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor produksi hortikultura di Kabupaten Garut masih rentan terhadap perubahan iklim dan belum sepenuhnya resilien.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Sistem Distribusi

Distribusi pangan ke wilayah kecamatan pinggiran dan desa dengan akses transportasi terbatas masih menghadapi kendala, baik dari sisi biaya logistik maupun waktu tempuh. Absennya BUMD pangan membuat pemerintah daerah lebih bergantung pada mekanisme pasar dan kerja sama lintas daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan.

3. Monitoring Harga dan Stok yang Belum Sepenuhnya Digital

Meskipun monitoring harga telah dilakukan secara rutin, pencatatan data harga dan ketersediaan ternak hidup di pasar hewan serta distribusi pangan strategis masih sebagian dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan analisis dan respons kebijakan ketika terjadi gejolak harga.

4. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Kabupaten Garut masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan komoditas tertentu seperti **bawang putih dan kedelai**, yang berasal dari luar daerah maupun impor. Ketergantungan ini meningkatkan risiko inflasi apabila terjadi gangguan pasokan nasional atau kenaikan harga di tingkat distributor.

1. Evaluasi Umum Kebijakan Pengendalian Inflasi

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh TPID Kabupaten Garut pada Triwulan III Tahun 2025 telah memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pada aspek produksi lokal, distribusi, dan sistem informasi harga.

Beberapa isu strategis yang masih memerlukan perhatian serius antara lain:

- kerentanan sektor produksi pangan terhadap perubahan cuaca,
- keterbatasan pengelolaan stok pasca panen,
- kesenjangan antara laporan distributor dan kondisi riil di lapangan,
- serta perlunya penguatan pengawasan terhadap praktik spekulatif.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Kab. Garut secara umum berdampak dalam menekan harga komoditas pokok inflasi, sehingga inflasi dapat tetap terjaga stabil. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi kedepannya, seperti:

1. Sektor produksi pangan strategis, khususnya komoditas beras, jagung, bawang merah dan cabai merah masih sangat rentan terhadap perubahan cuaca, sementara komoditas peternakan masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan ketersediaan pakan;
2. Penguatan dan *up to date* harga harian dari pasar serta akses masyarakat terhadap ketersediaan data komoditas pangan strategis perlu ditingkatkan;
3. Pengelolaan stok pangan strategis setelah produksi dan panen masih harus dioptimalkan, agar tidak terjadi kekurangan/kelangkaan pada saat terjadi gangguan cuaca atau tidak sedang masa panen;
4. Masih ketergantungan terhadap komoditas impor seperti bawang putih dan kedelai;
5. Lebih ditingkatkan untuk kegiatan monitoring harga di pasar dan kegiatan lain yang mendukung pengendalian inflasi di daerah;
6. Monitoring ketersediaan ternak hidup di pasar hewan dilakukan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan ternak hidup akan tetapi pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat respon kebijakan
7. Peningkatan pada aspek tindak lanjut terhadap temuan di lapangan, termasuk peran pengawasan dan penertiban pedagang spekulatif
8. Masih terdapat kesenjangan antara laporan distributor dan kondisi di lapangan, sehingga verifikasi lapangan perlu di perkuat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

1.

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III Tahun 2025, rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui TPID antara lain:

1. Stabilitas harga komoditas pangan strategis melalui kegiatan monitoring pemantauan harga di beberapa pasar serta penguatan distribusi pangan, sebagai berikut:
2. Pemantauan dan pelaporan harga komoditas pangan strategis secara real time melalui aplikasi SIMPANGAN yang telah terintegrasi dengan SILINDA JABAR, serta melakukan sidak pasar ke beberapa pasar tradisional saat harga-harga sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati
3. Melakukan sidak pada distributor khususnya untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga dan berada diatas HET.
4. Melakukan intervensi harga melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah (OPM) di beberapa Kecamatan yang digabungkan dengan Pelayanan Publik untuk Masyarakat di beberapa Kecamatan.
5. Melakukan Gerakan menanam cepat panen untuk komoditas padi dan jagung untukantisipasi lonjakan harga pada saat HBKN dan kondisi tertentu seperti kekeringan/curah hujan yang tinggi.
6. Menggerakkan Gerakan Halaman Rumah Masyarakat Terpadu (Harum Madu) untuk komoditas cabai sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Garut.
7. Mengintensifkan kerja sama dengan Bulog dan petani lokal untuk menyerap hasil panen, seperti gabah, guna meningkatkan cadangan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga.
8. Tidak bergantung pada satu wilayah produsen saja.
9. Meningkatkan koordinasi antara Dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan, untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan efisien.
10. Kolaborasi dengan kelompok tani dan penyuluh untuk stabilisasi pasokan lokal.
11. Fokuskan GPM di kecamatan dengan harga tertinggi atau akses pasar yang sulit.
12. Menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil, terutama untuk komoditas yang tidak diproduksi secara lokal
13. Mendorong setiap desa untuk memiliki lumbung pangan yang dapat digunakan sebagai cadangan saat terjadi lonjakan harga atau kekurangan pasokan
14. Skalkan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pakan mandiri (*self mixing*) ke lebih banyak kelompok peternak, khususnya di daerah sentra jagung sehingga para peternak tidak bergantung pada bahan pakan import
15. Revitalisasi pasar hewan dan pasar tradisional agar lebih siap menghadapi lonjakan permintaan saat hari besar keagamaan atau liburan
16. Penguatan cadangan pangan daerah yang siap digunakan untuk operasi pasar apabila terjadi gejolak harga
17. Edukasi tata kelola usaha peternakan modern melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan
18. Mendorong hilirisasi produk peternakan, seperti olahan telur dan daging dalam bentuk siap saji, agar peternak tidak tergantung pada pasar mentah
19. Rutin melakukan forum koordinasi lintas OPD, sektor swasta, dan akademisi, terutama menjelang momen rawan inflasi

1. Penguatan Produksi Pangan Lokal

Mendorong intensifikasi dan diversifikasi produksi pangan strategis melalui dukungan sarana produksi, penyuluhan, dan adaptasi teknologi pertanian tahan iklim.

1. Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Memperluas dan memperkuat kerja sama pasokan pangan dengan daerah sentra produksi sebagai substitusi peran BUMD pangan.

1. Digitalisasi Monitoring Harga dan Stok

Mengembangkan sistem monitoring harga dan ketersediaan pangan berbasis digital yang terintegrasi antar OPD untuk mempercepat respons kebijakan.

1. Penguatan Distribusi dan Logistik Daerah

Meningkatkan koordinasi distribusi, khususnya ke wilayah terpencil, serta mendorong efisiensi biaya logistik.

1. Peningkatan Pengawasan dan Tindak Lanjut Lapangan

Memperkuat pengawasan terhadap distributor dan pedagang, serta memastikan tindak lanjut cepat terhadap temuan spekulasi harga.